

# Pemko Bangun Drainase 1,4 KM

MARTUA,  
Batam

PEMERINTAH Kota (Pemko) Batam akan melakukan pelebaran drainase sekitar 1.400 meter di Kampung Sukadamai, Kelurahan Tanjungpiayu, Sei Beduk. Warga yang terdampak pembangunan, diminta segera pindah. Kesadaran itu diharapkan, karena drainase merupakan kebutuhan dan jika tidak dilakukan maka akan berdampak pada banjir yang berkelanjutan.

Imbauan itu disampaikan Wali Kota Batam, HM Rudi, saat meninjau proyek pemberdayaan masyarakat percepatan infrastruktur kelurahan (PM-PIK) Tahun 2017, Senin (23/4), di Kecamatan Sei Beduk. "Diimbau kepada warga yang terkena dampak agar segera pindah," imbaunya. Menurutnya, drainase yang akan dibangun panjangnya 1,4 kilometer dengan lebar 40 meter. Lokasi drainase ini ada di Kampung Sukadamai. Pembangunan drainase ini menurutnya harus dilaku-



F-ISTIMEWA

**PERMUKIMAN** di wilayah Tanjungpiayu yang mulai padat akan dibangun drainase jumbo yang lebarnya 40 meter dan panjangnya 1.400 meter.

kan segera dan tidak bisa ditunda. Apabila ditunda akan mengakibatkan banjir dan air akan meluap.

"Jika tidak kita bangun, air bisa naik ke atas dan masalah banjir ini tidak akan selesai-selesai nantinya. Yuk, kita sama-sama cari solusi karena pembangunan drainase ini harus segera dilakukan," imbaunya.

Pada kesempatan itu,

Rudi juga meninjau pembangunan yang dilakukan dengan anggaran PIK tahun 2017. Pembangunan semenisasi jalan lingkungan dengan beton, tersebar di Kelurahan Tanjungpiayu, Kelurahan Duriangkang dan Kelurahan Mangsang.

"Jadi total paket kegiatan di tiga kelurahan berjumlah 29 paket terdiri dari semenisasi jalan lingkun-

gan, drainase, batu miring dan gedung serba guna," beber Rudi.

Rudi mengatakan, dana untuk PM PIK akan dianggarkan setiap tahunnya. Dia berjanji untuk meningkatkan dana PIK setiap tahunnya. Hingga habis masa jabatannya dana PIK yang dianggarkan Rp1,8 miliar per kelurahan. "Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemko

untuk memperbaiki wajah Batam," jelasnya.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jalan ini tidak hanya masyarakat yang merasakan manfaatnya tapi juga orang yang datang ke Batam baik dari dalam maupun luar negeri. "Seluruh jalan utama ini akan saya buka sampai ke Sagulung. Begitu juga dengan jalan lingkungan

harus selesai dan target saya tujuh tahun ini sudah harus selesai semua," urai Rudi.

Rudi juga sempat menyinggung masalah pariwisata. Rudi mengajak masyarakat Kecamatan Sei Beduk untuk berperan dalam pariwisata yang tengah dikembangkan oleh Pemko Batam. Diyakininya jika wajah Batam sudah berubah maka orang akan ramai berkunjung ke Batam. Rudi menargetkan angka kunjungan wisatawan mancanegara dari 1,5 juta menjadi 3 juta setiap tahunnya.

"Jika orang ramai berkunjung maka berdampak pada Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Batam. Bukan hanya Pemko, masyarakat juga dapat uang masuk. Peluang ini harus bisa dimanfaatkan masyarakat dengan menyediakan apa yang dapat menarik minat orang yang berkunjung ke Batam," imbaunya.

Saat dialog, warga mengungkapkan pembangunan jalan lingkungan sangat dirasakan manfaat-

nya oleh masyarakat. Seperti yang diungkapkan warga dari RW 02 Kelurahan Duriangkang. Diakui, kondisi jalan lingkungan yang selama ini belum diaspal dan becek disaat hujan kini sudah bagus dan tidak tergenang air lagi.

"Kami bangga karena jalan di lingkungan kami sudah bagus dan masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Harapan kami dana PIK ini meningkat setiap tahunnya. Kepada Pak Walikota, atas nama masyarakat Kecamatan Sei Beduk kami mengucapkan terimakasih," sebut salah seorang warga.

Sementara di RW 15 Kavling Baru Sei Daun Kelurahan Tanjung Piayu, Wako meninjau sekaligus meresmikan Balai Pertemuan. Ketua RW 15, Handoko mengatakan keberadaan gedung serbaguna ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Gedung serbaguna yang berdampingan dengan Posyandu ini digunakan oleh warga untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. \*\*\*



# Pengusaha Minta OSS Cepat Di-launching



F-DOKUMEN/TANJUNGPINANG POS

**WALIKOTA** Batam Rudi dan Ketua BP Batam Lukita saat meninjau map Pelayanan Publik.

**BATAM** - Penerapan Online Single Submission (OSS) direncanakan berjalan saat Presiden RI, Joko Widodo meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP). Namun hingga saat ini, kepastian kehadiran Presiden belum

dipastikan. Informasi terakhir, Jokowi akan hadir Mei 2018. Karena itu, pengusaha di Batam berharap, sebelum Jokowi datang, OSS sudah mulai bisa dimanfaatkan.

Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan

Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hioeng, Sabtu (21/4) mengharapkan agar OSS mulai diterapkan. Sementara untuk peresmian atau launching mereka tidak mempermasalahkan menunggu Presiden.

"Investor menunggu sistem perizinan berusaha terintegrasi secara online atau OSS ini," katanya beralasan.

Diakui, pengusaha dan calon investor masih tetap bersabar menunggu peresmian OSS. Namun mereka tetap menunggu implementasinya dan jika dimungkinkan, dijalankan dulu. Sama dengan MPP yang sudah beroperasi walau belum diresmikan. "Katanya memang, masih menunggu kesiapan sistem. Tapi kalau bisa, mulai diuji coba," harapnya.

Disebutkan, mereka mendapat informasi, saat peresmian, sistem sudah benar-benar sudah siap. "Sekarang mungkin masih menunggu kesiapan dari sistem. Ya, tidak apa-apa ditunda. (mbb)

## Pemko Tutup 52 Warnet Ilegal

**BATAM** - Pemerintah Kota Batam, melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Batam, melakukan penutupan terhadap 52 warung internet (warnet) di Batuaji. Penutupan dilakukan, karena warnet-warnet itu tidak memiliki izin serta ditenggarai menjadi tempat anak-anak main game. Pengoperasian warnet tanpa izin ini diketahui saat petugas melakukan beberapa kali razia.

Kenurut Kepala Dinas DPM PTSP Batam, Gustian Riau, Senin (23/4), ada 52 Warnet di Batuaji yang ditutup usai dilakukan razia oleh pihak Satpol PP Pemko Batam. Warnet yang ditutup akan segera mengurus perizinan sesuai aturan yang berlaku. Nantinya, pemilik warnet akan dipanggil dan diberikan arahan untuk mematuhi aturan yang sudah ada.

"Kita tutup karena mereka tidak memiliki izin untuk membuka usaha warnet. Nanti kita akan berikan arahan secara kolektif. Kalau mereka mau mengikuti aturan tentu akan kita berikan izin," katanya.

Nantinya, saat terjadi lagi pelangga-

ran, maka izin yang dikeluarkan Pemko Batam akan dicabut dan tidak diberikan izin lagi untuk pengajuan selanjutnya. Diakuinya, pihaknya sudah menyegel 15 warnet yang mengantongi izin namun pada praktiknya menyalahi aturan saat kedatangan dalam razia yang di laksanakan Pemko Batam.

"Kita temukan anak-anak SMP dan SMA di jam sekolah dan saat larut malam. Ada juga yang penjaga warnetnya masih di bawah umur. Kalau penjaganya di bawah umur bagaimana bisa mengawasi, ini yang kita sayangkan," sesalnya.

Selain itu, diakui warnet-warnet itu ada yang buka sampai pukul 01.00 dini hari. Sementara aturan buka warnet hanya boleh hingga pukul 22.00. Karena itu, diimbau agar pengusaha warnet untuk mengikuti aturan sesuai yang ditetapkan Peraturan Walikota (Perwako).

"Kami mohon kepada pengusaha warnet ikuti aturan seperti batas waktu. Posisi layar monitor tidak membelakangi pandangan orang agar menghindari bacaan atau tontonan yang tidak layak, tidak boleh gelap," imbaunya. (mbb)

**Tokeo Jam Sepuluh**

**TANJUNGPINANG POS**  
Koran Nasional dan Kepri